

LAPORAN KINERJA
BRSDM
TRIWULAN II 2023

Kata Pengantar



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Triwulan II Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BRSDM selama Triwulan II Tahun 2023, dengan penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

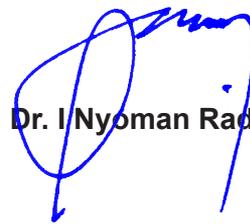
Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRSDM dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, sejalan dengan

pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI secara umum dan BRSDM pada khususnya, telah menerapkan metode pengukuran kinerja yang terukur. Kinerja BRSDM diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Program (SP) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BRSDM 2023 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya pada Triwulan II Tahun 2023. Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja BRSDM ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Jakarta, 27 Juli 2023

Kepala BRSDM,



Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi, M.Sc

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan	3
1.3 Tugas dan Fungsi	3
1.4 Keragaan SDM BRSDM.....	8
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	9
1.6 Potensi dan Permasalahan	10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023	20
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	21
2.4 Pengukuran Kinerja	24
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja BRSDM Triwulan II Tahun 2023	28
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	28
3.3 Realisasi Anggaran BRSDM Tahun 2023.....	50
BAB 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	59
Lampiran	61

Daftar Tabel

Tabel 1.	Rencana Kerja BRSDM Tahun 2023	20
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja BRSDM Tahun 2023	21
Tabel 3.	Capaian Kinerja BRSDM Tahun 2023	29
Tabel 4.	Capaian IKU 4	32
Tabel 5.	Sebaran Capaian IKU 4 Per Satminkal	33
Tabel 6.	Capaian IKU 5	34
Tabel 7.	Sebaran Capaian IKU 5 Per Satminkal	35
Tabel 8.	Satuan Kerja Lingkup BRSDM Berpredikat WBK	40
Tabel 9.	Capaian IKM 11	40
Tabel 10.	Capaian IKM 13	41
Tabel 11.	Capaian IKM 16	44
Tabel 12.	Capaian IKM 17	45
Tabel 13.	Capaian IKM 19	47
Tabel 14.	Capaian IKM 23	49
Tabel 15.	Tabel Realisasi Anggaran BRSDM	50
Tabel 16.	Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2023	51
Tabel 17.	Perhitungan Efisiensi Anggaran BRSDM 2023.	55

Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi BRSDM	8
Gambar 2.	Komposisi SDM BRSDM	8
Gambar 3.	Rincian PNS BRSDM	9
Gambar 4.	Capaian Kinerja BRSDM Triwulan II 2023	28
Gambar 5.	Capaian Kinerja BRSDM Triwulan II Tahun 2023	58



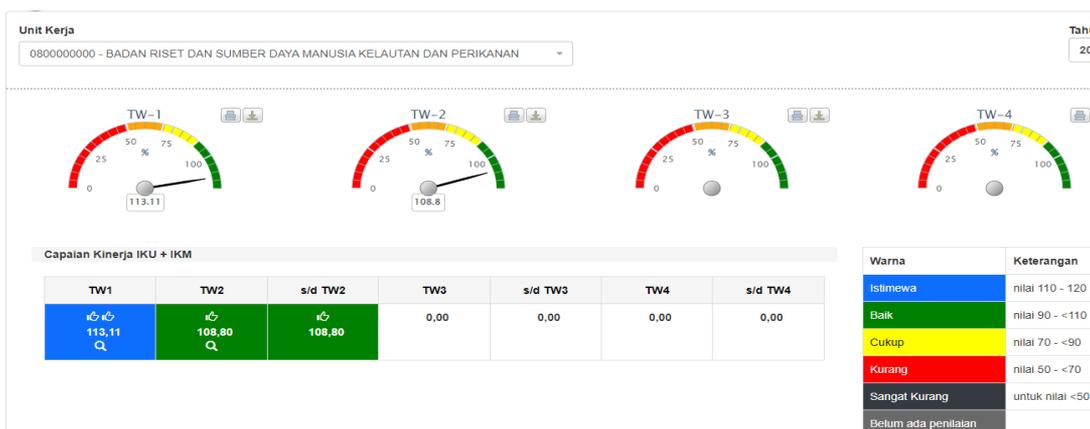
Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-3 yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 65 /BRSDM.1/RC.610/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Permohonan Pengesahan Perjanjian Kinerja Level 1 BRSDM Tahun 2023 Perjanjian Kinerja (KKP) BRSDM terdiri dari 7 (Tujuh) Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta 14 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja BRSDM tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan menggunakan aplikasi kinerja <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja BRSDM pada

Triwulan II Tahun 2023 sebesar 108,80%, sebagaimana *dashboard kinerja* sebagai berikut:



Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dari 23 Indikator Kinerja yang menjadi target BRSDM, terdapat 4 Indikator Kinerja berstatus biru dan 4 Indikator Kinerja capaian hijau atau telah mencapai/melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BRSDM Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok) dengan target Triwulan II sebanyak 950 Kelompok dan capaian sebesar 2.033 Kelompok (120%);
2. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya dengan target Triwulan II sebanyak 180 Kelompok dan capaian sebesar 180 Kelompok (100%);
3. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit) dengan target Triwulan II sebanyak 13 unit dan capaian 13 unit (100%);
4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM dengan target Triwulan II sebanyak 71% dan capaian sebesar 72,75% (102,46);
5. Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dengan target Triwulan II sebanyak 92% dan capaian sebesar 99,76% (108,43);

-
6. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%) dengan target Triwulan II sebanyak 75% dan capaian sebesar 91,92% (120%);
 7. Nilai IKPA Lingkup BRSDM dengan target Triwulan II sebanyak 82% dan capaian sebesar 92,60% (112,93%);
 8. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) dengan target Triwulan II sebanyak 3.099 orang dan capaian sebesar 3.900 orang (120%).

Secara umum kinerja BRSDM cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. IKU dengan Capaian Triwulan Melampaui Target Tahunan

Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu Persentase unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dan Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM KP. Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

2. IKU dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRSDM. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRSDM. Akhirnya, BRSDM berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.



Halaman Kosong



Bab I

Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Tugas dan Fungsi
- 1.4. Keragaan SDM BRSDM
- 1.5. Sistematika Laporan Kinerja
- 1.6. Potensi dan Permasalahan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) Yang Berkelanjutan;
- 3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
- 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
- 5) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
- 7) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2019-2024 ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Peran KKP yang dimandatkan

dalam peraturan perundang-undangan serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita melalui kebijakan pokok yang diarahkan:

- 1) Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja BRSDM Triwulan II Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BRSDM Triwulan II Tahun 2023 ini, bertujuan:

- 1). Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan II Tahun 2023.
- 2). Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRSDM untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 6 “Badan Riset Sumberdaya Manusia (BRSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Sampai Triwulan II, KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BRSDM berdasarkan Peraturan Menteri Nomor

48/PERMEN-KP/2020. BRSDM merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

BRSDM mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dengan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 2) pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- 4) pelaksanaan administrasi BRSDM; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh peneliti dilingkungan BRSDM melakukan penyesuaian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga akan terjadi transformasi kelembagaan Pusat dan UPT lingkup BRSDM.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BRSDM didukung oleh unit kerja eselon II sebagai berikut:

A. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

-
- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - 2) Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 3) Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 4) Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
 - 5). Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Pusat Riset Kelautan

Pusat Riset Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- 2) Penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan

-
- 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

C. Pusat Riset Perikanan

Pusat Riset Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan. Pusat Riset Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
- 2) penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
- 3) penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset perikanan; dan
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

D. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;

-
- 2) penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
 - 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan kelautan dan perikanan; dan
 - 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.
 - 5) Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 2) penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 3) penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

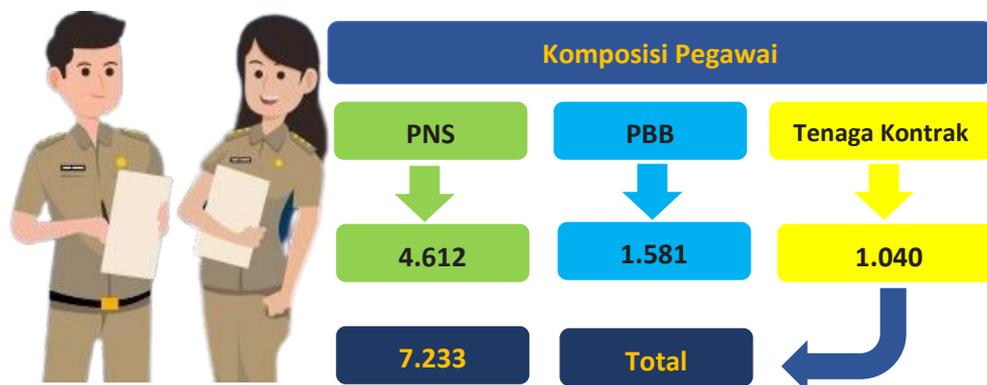
Struktur organisasi BRSDM sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BRSDM

1.4 Keragaan SDM BRSDM

BRSDM memiliki 44 satuan kerja dengan didukung oleh 7.233 pegawai yang terdiri dari 4.612 PNS, 1.581 Penyuluh Perikanan Bantu/PPB dan 1.040 Tenaga Kontrak. Komposisi dari pegawai PNS yang berada di Pusat dan Daerah, sebagai berikut:



Gambar 2. Komposisi SDM BRSDM



Gambar 3. Rincian PNS BRSDM

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2023.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BRSDM seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BRSDM.
3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis BRSDM 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja BRSDM Tahun 2023 serta Pengukuran Kinerja.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya

-
5. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
 6. Lampiran, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

1.6 Potensi dan Permasalahan

1) Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, riset berperan menjadi pendorong penerapan teknologi, dengan keberadaan 5 unit eselon II yaitu 2 (dua) Pusat Riset (Riset Kelautan dan Riset Perikanan) dan 3 (tiga) Balai Besar, 8 (delapan) Balai dan 5 (lima) Loka, namun dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN. Peran BRSDM di bidang pendidikan didukung keberadaan 18 satuan pendidikan, yang terdiri atas 1 (satu) Sekolah Tinggi, 9 (sembilan) Politeknik KP, 7 (tujuh) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dengan tenaga pendidik berjumlah 542 orang terdiri atas 96 guru dan 446 dosen, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan teaching factory dengan 80% praktek dan 20% teori.

Peran BRSDM di bidang pelatihan didukung dengan keberadaan 5 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 413 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 63 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia, disamping itu didukung dengan jumlah tenaga pelatih terdiri atas 34 widyaiswara dan 135 instruktur.

Kegiatan Pelatihan ditujukan bagi masyarakat KP dengan jenis pelatihan bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, konservasi, mesin

perikanan, pelatihan inovatif dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan, yang dapat dilengkapi dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan menggunakan standar SKKNI, KKNI dan SKK. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi aparatur negara, meliputi pelatihan struktural (dalam jabatan dan prajabatan), pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta aparatur daerah dalam rangka mendukung program dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2023 terdapat 3.906 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 1.581 orang Penyuluh Perikanan bantu, 2.325 orang penyuluh PNS, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat.

2). Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BRSDM akan mengalami transformasi kelembagaan dan tugas dan fungsi.

-
- 2) Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang riset dan SDM sebagai instrumen penjaminan mutu riset dan pengembangan SDM;
 - 3) Kerangka regulasi terkait kerangka kualifikasi nasional Indonesia belum memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan aparatur di bidang KP
 - 4) Jumlah, sebaran dan kompetensi tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) serta penyuluh perikanan masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan di lapang;
 - 5) Penyediaan kurikulum/modul pelatihan dan penyuluhan belum sepenuhnya terstandarisasi yang berbasis digital yang mudah diakses baik nasional maupun International;
 - 6) Usaha yang dikembangkan skala kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan serta masih menggunakan teknologi terapan konvensional;
 - 7) Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
 - 8) Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif.



Bab II

Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kerja Tahunan
- 2.3. Perjanjian Kinerja
- 2.4. Pengukuran Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional.

Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun

2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM.

Peran strategis BRSDM KP meliputi:

- 1) Merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten;
- 2) Menyelenggarakan riset dan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital;
- 3) Menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri;
- 4) Melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien. dan tepat sasaran;
- 5) Melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset KP;
- 6) Meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP;
- 7) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal;
- 8) Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/pedulih terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP;
- 9) Mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri;
- 10) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil riset serta pengembangan SDM.

Tugas dan fungsi BRSDM KP sebagai penyelenggara riset inovatif di bidang KP dan pengembangan SDM kompeten, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif dan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BRSDM KP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara *physical system*, komputasi dan juga *network/komunikasi*, sedangkan *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Pada era *society 5.0* manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan. Situasi ini akan memberikan peluang bagi BRSDM KP untuk berinovasi dalam hal teknologi, struktur organisasi/kelembagaan, dan aturan/kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, BRSDM KP melakukan penyusunan Renstra 2020-2024, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

A. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong

Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi BRSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

B. Misi

Misi BRSDM adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

- 1) Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
- 2) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
- 3) Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 4) Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BRSDM KP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- 2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- 4) Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 5) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik

D. Sasaran Program

Renstra BRSDM Tahun 2019-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BRSDM sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda Logical Framework . Sasaran Strategis yang akan dicapai di level O KKP adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja “Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya”, setiap tahun sebanyak 1.800 kelompok selama tahun 2020-2024 serta Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk” setiap tahunnya sebanyak 3.000 kelompok selama tahun 2020-2024.

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai pada level 0 KKP adalah "Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat" dengan Indikator Kinerja:

- 1) Nilai PNB Sektor KP, dengan target setiap tahun sebanyak 1,87 Triliun selama 2020-2024.
- 2) Tenaga Kerja yang terlibat di sektor KP, dengan target setiap tahun sebanyak 688.422 orang selama 2020-2024.

Sasaran Strategis ke empat (SS-4) yang akan dicapai di level 0 KKP adalah "Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat" dengan Indikator Kinerja Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri, dengan target 65% pada tahun 2020 menjadi 72% pada tahun 2024.

Untuk melaksanakan pencapaian SS sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BRSDM melalui Sasaran Strategis ke Sembilan (SS-9) "Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas" dengan indikator kinerja sesuai dengan rewiu Renstra BRSDM Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Indeks Profesionalisme ASN BRSDM dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024.
- 2) Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar 82% pada tahun 2020 menjadi 92% pada tahun 2024.
- 3) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi BRSDM dari 30 pada tahun 2020 menjadi 33,5 pada tahun 2024.
- 4) Penilaian Mandiri SAKIP BRSDM, sampai pada tahun 2024 sebanyak 81.
- 5) Level Maturitas SPIP BRSDM, 3 pada tahun 2020 menjadi 3,1 pada tahun 2024.
- 6) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRSDM dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Sangat Baik (89) pada tahun 2024.

- 7) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan realisasi anggaran sebesar $\leq 1\%$ pada tahun 2020 menjadi $\leq 0,5\%$ pada tahun 2023-2024.
- 8) Jumlah unit kerja BRSDM berpredikat menuju WBK (satker, kumulatif) pada tahun 2020 sebanyak 10 satker, sampai dengan 2024 sebanyak 15 satker lingkup BRSDM.
- 9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BRSDM, sebesar 60% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024.
10. Nilai Kinerja Anggaran BRSDM dengan target sebesar 85 pada tahun 2020 menjadi 86 pada tahun 2024.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRSDM Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel1. Rencana Kerja BRSDM Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	333.322.212
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	203.074.328
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	130.247.884
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	5.373.250
	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	2.800.000
	Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	2.323.250
	Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan	250.000
3	Program Dukungan Manajemen	1.050.962.966
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRSDMKP	1.039.462.966
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	12.121.087
Total Anggaran BRSDM Tahun 2023		1.390.279.515

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BRSDM harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran program BRSDM.

Pada tahun 2023 Perjanjian Kinerja Level 1 BRSDM, memiliki 7 Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja Utama serta 14 Indikator Kinerja Managerial. Sampai dengan bulan Juni PK BRSDM mengalami perubahan Target sesuai Nota Dinas Sekretaris BRSDM Nomor: 1185 /BRSDM.1/RC.610/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Permohonan Pengesahan Perjanjian Kinerja Level 1 BRSDM Tahun 2023, sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRSDM Tahun 2023

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET PK Januari	TARGET PK Juni
1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70	70
		2	Nilai PNBK BRSDM (Rupiah Miliar)	24,731	24,731
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	392	392

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET PK Januari	TARGET PK Juni
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang ditumbuh kembangkan	4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	3.000	3.000
		5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.800	1.800
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)	12.342	12.342
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	7	7
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	14	39
6	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan	9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	11	11
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	10	Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)	33,5	33,5
		11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit)	15	15

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET PK Januari	TARGET PK Juni
		12 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2022 (%)	≤0,5	≤0,5
		13 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	75	75
		14 Nilai PM SAKIP BRSDM (nilai)	80,5	80,5
		15 Nilai Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)	3,1	3,1
		16 Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	92
		17 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%)	75	75

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET PK Januari	TARGET PK Juni
		18 Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (%)	75	75
		19 Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	89	89
		20 Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	86	86
		21 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	77,5	77,5
		22 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	77,5	77,5
		23 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.005	5.195

2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BRSDM Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;

-
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

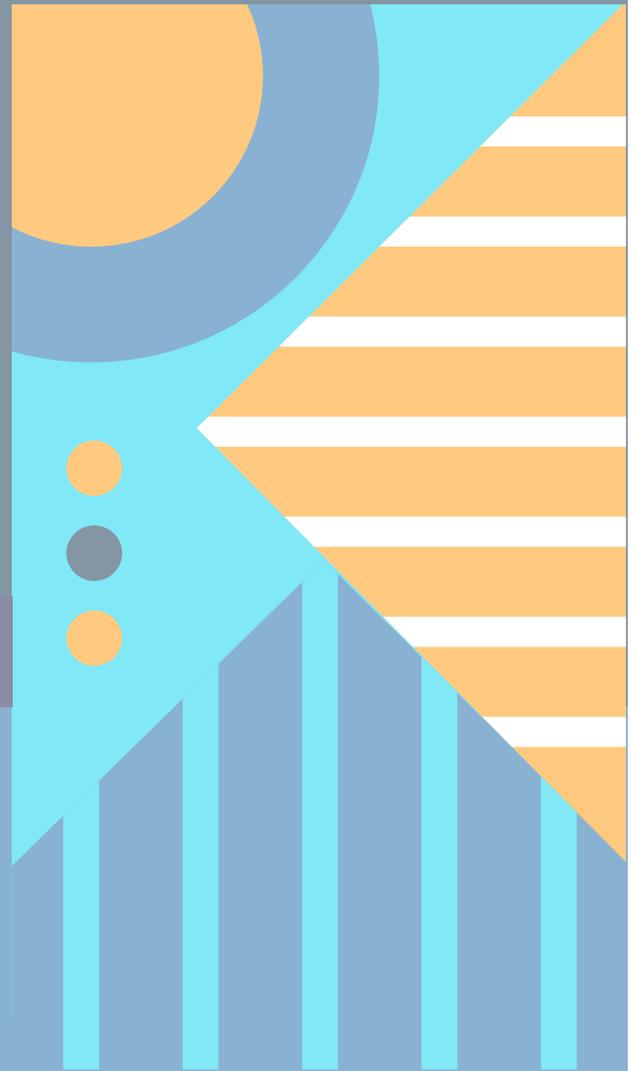


Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja lingkup BRSDM dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja sebagaimana Surat Keputusan Kepala BRSDM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan triwulanan tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari level 3 unit pelaksana teknis sampai ke level 2 pusat-pusat dan sekretariat.



Halaman Kosong



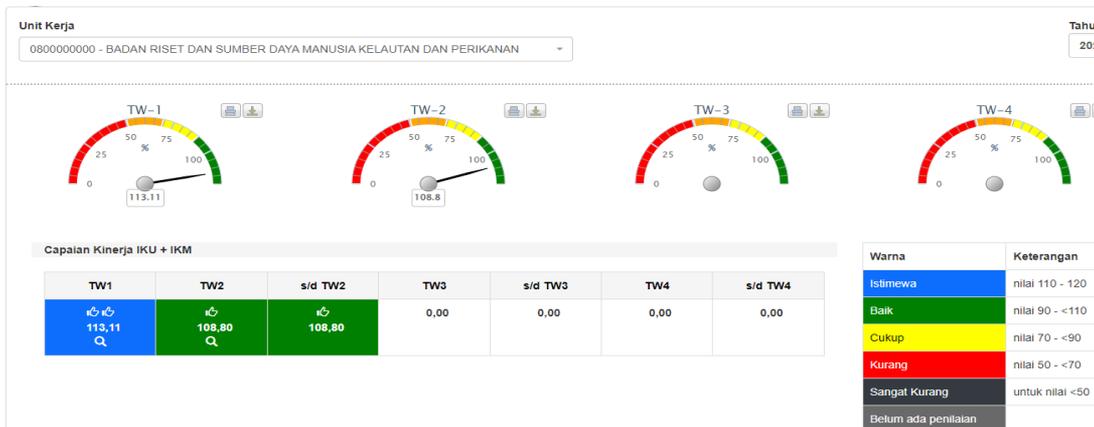
Bab III

Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama
Triwulan III Tahun 2022
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja
- 3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.1 Capaian Kinerja BRSDM Triwulan II Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja BRSDM Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi kinerjajaku pada tautan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRSDM Triwulan II Tahun 2023 sebesar 108,80 %, sebagaimana pada dashboard kinerjajaku sebagai berikut:



Gambar 4. Capaian Kinerja BRSDM Triwulan II 2023

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRSDM. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran

strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Tabel 3. Capaian Kinerja BRSDM Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target Triwulan II	Capaian Triwulan II	%
1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70			
2	Nilai PNPB BRSDM (Rupiah Miliar)	24,731			
3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	392			
4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	3.000	950	2.033	120
5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.800	180	180	100
6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)	12.342			
7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	7			
8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	39			
9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	11			
10	Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)	33,5			
11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit)	15	13	13	100

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Target Triwulan II	Capaian Triwulan II	%
12	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2022 (%)	≤0,5			
13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	75	71	72,75	102,46
14	Nilai PM SAKIP BRSDM (nilai)	80,5			
15	Nilai Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)	3,1			
16	Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	92	99,76	108,43
17	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%)	75	75	91,92	120
18	Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (%)	75			
19	Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	89	82	92,60	112,93
20	Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	86			
21	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	77,5			
22	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	77,5			
23	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.195	3.099	3.900	120

Sasaran Program 1

SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri

Indikator Kinerja 1

Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)

Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha dan dunia industri pada Tahun 2023, ditargetkan sebanyak 70 %. Indikator ini merupakan representasi dari jumlah lulusan pendidikan menengah dan vokasi KP yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan serta jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan dan/atau bekerja di dunia usaha dan industri.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%) akan diukur pada Triwulan IV Tahun 2023. Sampai Triwulan II Satuan Pendidikan KP telah meluluskan peserta didik sebanyak 444 Orang serta Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP telah melatih masyarakat sebanyak 13.321 Orang.

Indikator Kinerja 2

Nilai PNBPR BRSDM (Rupiah Miliar)

Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPR adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Target tahunan IKU ini adalah Rp.24,731 Miliar, dengan periode pengukuran adalah tahunan. Capaian IKU nilai PNBPR sampai Triwulan II sebanyak 11,46 Miliar (46,9%).

Sasaran Program 2

SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)

Indikator Kinerja 3

Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)

Indikator ini untuk mengetahui berapa banyak lulusan satuan pendidikan dan pelatihan KP yang melakukan rintisan wirausaha dibidang kelautan dan perikanan yang membentuk *start up*. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV tahun 2023. Sampai Triwulan II Satuan Pendidikan KP telah meluluskan peserta didik sebanyak 444 Orang serta Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP telah melatih masyarakat sebanyak 13.321 Orang.

Sasaran Program 3

Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang yang ditumbuhkan dan dikembangkan

Indikator Kinerja 4

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)

Jumlah kelompok KP yang dibentuk pada Tahun 2023 memiliki target sebanyak 3.000 kelompok setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok mengacu pada KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok) pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian IKU 4

IKU-4. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok)									
Realisasi TW II 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
810	2.232	-	3.000	950	2.033	120	-	3.000	67,77

Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok) pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 2.033 Kelompok (120 %) dari target 950 kelompok. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2022, dikarenakan periode pengukuran pada tahun 2022 dihitung secara tahunan. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian sebesar 67,77%. Pembentukan kelompok ditandai dengan penerbitan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat (lurah atau kepala desa) dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota. Sebaran kelompok yang dibentuk berdasarkan Satminkal, sebagai berikut:

Tabel 5. Sebaran Capaian IKU 4 Per Satminkal

No	Saminkal	Target Tahun 2023	Capaian TW 2	%
1	BPPP Medan	434	331	76,27
2	BPPP Tegal	413	143	34,63
3	BPPP Banyuwangi	434	370	85,25
4	BPPP Bitung	301	105	34,89
5	BPPP Ambon	215	110	51,16
6	BRPPUPP Palembang	306	301	98,37
7	BRPBATPP Bogor	268	179	66,79
8	BBRBLPP Gondol	307	178	57,98
9	BRPBAPPP Maros	322	316	98,13
	Total	3.000	2.033	67,05

Dalam melakukan kegiatan penumbuhan kelompok, Penyuluh Perikanan melakukan identifikasi Pelaku Utama yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.
2. Memiliki usaha sektor kelautan dan perikanan.
3. Merupakan binaan dari penyuluh perikanan.

Penyebab keberhasilan IKU ini dikarenakan:

1. Intervensi kegiatan dalam rangka percepatan pembentukan kelompok oleh Balai - Balai untuk mengakomodasi keinginan masyarakat terkait pembentukan kelompok di wilayah kerjanya.
1. Kesadaran masyarakat Pelaku utama/ Pelaku usaha KP tentang pentingnya bersinergi membentuk kelompok terkait kemudahan akses untuk mendapatkan bantuan dan pemodalan usaha.
2. Adanya antusiasme masyarakat KP untuk membentuk kelompok baru untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2023.

Indikator Kinerja 5

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)

IKU kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya berdasarkan KEPMEN KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Maka kelompok perikanan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu: 1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dari segi kemampuannya, dengan batas nilai skoring penilaian 0 s.d. 350. 2. Kelas Madya, merupakan kelas menengah dimana kelembagaan pada kelas madya sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 351 s.d. 650. 3. Kelas Utama, merupakan kelas yang tertinggi dimana kelembagaan pada kelas utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai skoring 651 s.d. 1.000. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IKU 5

IKU-5. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)									
Realisasi TW II 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
60	118	-	1.800	180	180	100	-	1.800	10

Capaian IKU Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 180 Kelompok (100%) dari target 180 kelompok. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2022, dikarenakan periode pengukuran pada tahun 2022 dihitung secara tahunan. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian sebesar 10%.

Tabel 7. Sebaran Capaian IKU 5 Per Satminkal

No	Saminkal	Target Tahun 2023	Capaian TW 2	%
1	BPPP Medan	235	10	4,26
2	BPPP Tegal	240	11	4,58
3	BPPP Banyuwangi	270	64	23,70
4	BPPP Bitung	90	5	5,56
5	BPPP Ambon	75	22	29,33
6	BRPPUPP Palembang	250	18	7,20
7	BRPBATPP Bogor	120	14	11,67
8	BBRBLPP Gondol	230	20	8,70
9	BRPBAPPP Maros	290	16	5,52
Total		1800	180	100
Total Capaian TW II				10

Keberhasilan ini disebabkan perkembangan kemampuan kapasitas kelompok dan antusiasme kelompok atas pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan serta peran aktif penyuluh dan Dinas KP dalam mensosialisasikan peningkatan kelas kelompok. Pencapaian target 2022 didukung oleh beberapa kondisi yang mendukung pencapaian, yaitu:

1. Pelaksanaan manajemen kinerja di BRSDM dengan cascading IKU yang terstruktur mulai dari Puslatluh KP, Satminkal Penyuluhan, sampai ke Penyuluh Perikanan.
2. Pendampingan yang terprogram oleh Penyuluh Perikanan, baik PNS dan PPB dengan target kinerja yang sama terhadap IKU peningkatan kelas kelompok serta pendampingan proses administrasi pengukuhan kelas kelompok. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Satminkal dengan Penyuluh

Perikanan, pelaporan online penyuluh, SKP yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Indikator Kinerja 6

Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa maupun yang menerima manfaat dari sektor perikanan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BRSDM akan diukur pada Triwulan IV Tahun 2023. Target IKU ini pada tahun 2023 sebesar 12.342 Orang. Sampai Triwulan II capaian IKU ini sebesar 1.626 Orang (13,17%) yang terdiri dari 1.598 Penyuluh Perikanan Bantu dan 28 Penyuluh Perikanan Swadaya.

Sasaran Program 4

Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat

Indikator Kinerja 7

Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (desa)

BRSDM sebagai penghasil inovasi teknologi dan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing memiliki peran dalam pembangunan KP melalui transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Desa Mitra, atau selanjutnya disebut *Smart Fisheries Village (SFV)*, adalah program yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BRSDM untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan. Pengembangan SFV bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, komunitas pekerja, pelestarian lingkungan dan penerapan teknologi digital. SFV juga merupakan model pengembangan desa perikanan pintar secara terintegrasi dengan berkolaborasi bersama banyak pihak terkait yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi, industri, serta masyarakat. SMART sendiri merupakan singkatan dari *Sustainable, Modernization, Acceleration, Regeneration, dan Technology*, sehingga melalui program ini diharapkan akan terbentuk desa-desa perikanan unggulan yang

produktif, mampu menerapkan teknologi informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Target IKU Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP pada tahun 2023 sebanyak 7 desa. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023, dengan target 1 Desa yang dicascading ke Satuan Kerja Pusat Pendidikan KP berlokasi di Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Sedangkan 6 Desa lainnya dicascading ke Satuan Kerja Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, yang berlokasi di Desa Linau, Desa Ranah Koto Tinggi, Desa Patratani, Desa Kawali, Desa Mangunegara dan Desa Kendal Bulur. Kegiatan yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II adalah Kunjungan lapangan Tim BRSDMKP, untuk menentukan rona awal TO dan Penyusunan Grand Design SFV.

Sasaran Program 5

Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan (unit)

Indikator Kinerja 8

Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)

Peningkatan kapasitas sarana berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh Pusat pendidikan dan pelatihan KP. Perhitungan pada IKU ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana dan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IKU ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BRSDM KP dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan riset dan SDM yang efektif dan kualitas pelaksanaan pengajaran di satuan pendidikan KP. Sampai bulan Juni 2023, terjadi revisi PK BRSDM yang disebabkan adanya penambahan pagu PNBPN sehingga Target capaian pada Tahun 2023 semula 14 Unit menjadi sebanyak 39 Unit. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023. Sampai Triwulan II Proses capaian IKU ini masih pada tahap pengerjaan peningkatan Sarana dan Prasarana oleh pihak ketiga baik di Satuan Kerja Pusdik KP dan Puslatluh

KP. Sedangkan untuk dana penambahan pagu PNBPN masih pada tahapan pengusulan dan menunggu persetujuan dari Biro Keuangan.

Sasaran Program 6

Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan

Indikator Kinerja 9

Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)

Rekomendasi kebijakan adalah proses untuk melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Subarsono, 2020). *Policy Brief* merupakan salah satu dokumen penyampaian hasil riset rekomendasi kebijakan berupa analisis/kajian berdasarkan data-data ilmiah yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi terhadap isu strategis/kebijakan yang disajikan secara singkat (3-4 halaman) menampilkan opsi kebijakan, implikasi dan rekomendasi untuk stakeholder dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang digunakan sebagai bahan kebijakan stakeholder merupakan dokumen rekomendasi (dalam bentuk *policy brief*) yang disampaikan kepada stakeholder melalui Surat dari Kepala BRSDM. Periode pengukuran IKU ini secara tahunan, dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV tahun 2023. Sampai Triwulan II IKU ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran masih dalam kondisi terblokir.

Sasaran Program 7

Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM

Indikator Kinerja 10

Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau *business process*; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi diperoleh melalui Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh tim KEMENPAN RB sesuai

dengan Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja manajerial (IKM) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi BRSDM (Nilai) dilakukan secara tahunan.

Indikator Kinerja 1 1

Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit, kumulatif)

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai jumlah unit kerja lingkup BRSDM yang berpredikat menuju WBK. Hal ini sebagai implementasi dari komitmen bersama seluruh Pejabat Eselon I untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

Setiap unit kerja Eselon I lingkup KKP sebagai unit pembangun integritas berperan untuk mendorong terwujudnya WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerjanya. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menetapkan satuan kerja untuk menjadi proyek percontohan. Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dalam penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker di lingkungan BRSDM dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian indikator kinerja unit berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) lingkup BRSDM Tahun 2017 sampai Tahun 2022 mencapai 13 Unit satker dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Satuan Kerja Lingkup BRSDM Berpredikat WBK

No	Satuan Kerja	Tahun Perolehan
1	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak	2017
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros	2017
3	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol	2017
4	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	2017
5	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru	2018
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	2018
7	Balai Riset Observasi Laut, Perancak	2019
8	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BPRPUPP) Palembang	2019
9	Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi	2021
10	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	2021
11	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelauatan dan Perikanan	2022
12	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	2022
13	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	2022

Target IKM Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM sebanyak 15 Unit. Capaian indikator kinerja ini pada Triwulan II merupakan capaian pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian IKM 11

IKU-11. Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit, kumulatif)									
Realisasi TW II 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
8	8	10	15	13	13	100	30	13	100

Capaian IKM Unit Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 13 Unit (100 %) dari target 13 kelompok. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2022 meningkat sebanyak 30%.

Perbandingan capaian terhadap target Renstra, presentase capaian triwulan II sebesar 100 %.

Indikator Kinerja 12

Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BRSDM (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian atas indikator Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BRSDM (%) akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Indikator Kinerja 13

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)

Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRSDM merupakan Indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Iku ini diukur secara semesteran. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM pada triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian IKM 13

IKU-12. Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRSDM (Indeks)									
Realisasi TW II 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	68,74	72,01	75	71	72,75	102,46	1,03	76	95,72

Pada triwulan II IKM Indeks Profesionalitas ASN BRSDM ditargetkan pada angka 71 capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah 72,75 atau sebesar 102,46%. Capaian ini sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro SDMAO Nomor: 1082/SJ.3/KP.720/VII/2023/SJ tanggal 12 Juli 2023 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Semester I Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2022, terjadi kenaikan sebesar 1,03%, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sebesar 95,72%.

Keberhasilan pencapaian Indeks Profesionalitas ASN BRSDM disebabkan antara lain oleh kegiatan pengembangan kompetensi berupa sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang diikuti pegawai BRSDM. Disamping itu, keaktifan pegawai pada kegiatan-kegiatan webinar atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara

daring sebagai faktor pemicu keberhasilan pencapaian IKU ini. Kegiatan pendukung keberhasilan IKU antara lain kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM Aparatur yang telah disusun secara berkala dengan pelayanan kegiatan yang baik.

Indikator Kinerja 14

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRSDM (nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/ daerah. Penilaian SAKIP di lingkup KKP sampai dengan tahun 2021, dilakukan berdasarkan Permen PAN RB 12 Tahun

2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pada tahun 2023 penilaian SAKIP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem reward and punishment, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau outcome. Capaian IKM PM SAKIP akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023. Sampai Triwulan II progres kegiatan masih pada tahap penilaian mandiri oleh Tim Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada tanggal 11-16 Juli 2023.

Indikator Kinerja 15

Nilai Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Level maturitas SPIP pada level 3 dapat dicirikan dari sejumlah indikator yaitu: kebijakan dan prosedur tertulis, pengkomunikasian kebijakan dan prosedur, dan Implementasi kebijakan dan prosedur, serta dokumentasi. Capaian kinerja IKM ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023. Adapun progres kegiatan masih pada tahap penginputan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penilaian maturitas SPIP pada aplikasi SPIP terintegrasi.

Indikator Kinerja 16

Persentase unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Indikator ini didefinisikan sebagai bagaimana pengetahuan dapat di sampaikan atau disebarkan dalam suatu media. Ruang lingkup manajemen pengetahuan di Tahun 2019 diterjemahkan sebagai tingkat penerapan MP di Level 1 KKP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 20%) (ii) keikutsertaan (bobot 40%), (iii)

keaktifan Pejabat/staf unit kerja level 1 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%).

Capaian IKU Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian IKM 16

IKU-16. Presentase Unit Kerja lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (%)									
Realisasi TW II 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
78,58	97,48	99,72	92	92	99,76	108,43	0,04	92	108,43

Capaian IKM Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) pada Triwulan II tahun 2023 mencapai 99,76% (108,43%) dari target 92%. Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Pusdatin Nomor: 1971/SJ.7/TU.210/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang capaian Indikator Kinerja sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 0,04%. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 108,43%. Dari data-data yang dijabarkan di atas, capaian tahun 2023 meraih keberhasilan disebabkan oleh:

- 1) Persentase nilai terbesar diperoleh dari Komponen penilaian Dokumen karena komponen ini yang menjadi nilai capaian BRSDM sudah terunggah dalam manajemen pengetahuan.
- 2) Persentase nilai terbesar diperoleh dari keikutsertaan karena Pimpinan dan Staff BRSDM sudah berkontribusi dalam keikutsertaan dari tahun sebelumnya.
- 3) Pimpinan Level 2, Koordinator dan Subkoordinator Lingkup Pusat BRSDM yang telah memberikan kontribusi pengetahuan berupa informasi dengan ketentuan 5W+1H yang disebarakan dalam aplikasi Bitrix24.

- 4) Telah dilaksanakan monitoring dengan melakukan pertemuan rapat serta koordinasi dengan komunikasi langsung sebelum masa waktu.

Indikator Kinerja 17

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDMKP (%)

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BRSDMKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh UPT lingkup BRSDM yang menjadi obyek pengawasan. Capaian atas indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian IKM 17

IKU-17. Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDMKP (%)									
Realisasi TW II 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
64,55	85,16	74,60	75	75	91,92	120	23,22	75	120

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BRSDMKP telah mencapai target yaitu 91,92% (120%) dari target 75. Capaian ini sesuai dengan Nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: 1063/ITJ.O/TU.140/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang capaian indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 23,22%, dan dibandingkan dengan target Renstra BRSDM Tahun 2024 mencapai 120 %. Capaian indikator kinerja ini didapatkan dari 182 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dari total 198 temuan awal.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BRSDMKP merupakan

keberhasilan atas pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen KKP.

Indikator Kinerja 18

Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (%)

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN RB No. 30 Tahun 2014). Capaian Indikator Kinerja Hasil Proposal Inovasi pelayanan publik di lingkungan BRSDM akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023. Progres capaian pada triwulan II 2023, telah dilaksanakan Rapat Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup BRSDM Tahun 2023 terhadap 9 proposal yang diusulkan oleh Satuan Kerja. Berdasarkan Berita Acara Nomor: B.2008/BRSDM.1/TU.220/IV/2023 tanggal 14 April 2023, terdapat 5 Proposal yang memenuhi kriteria , diantaranya sebagai berikut:

1. SILAJUR (Sistem Pelayanan Jurnal Ilmiah) dari BBRSEKP Jakarta;
2. SI PINTAR (Sistem Pelatihan Terintegrasi Berbasis Smartphone) dari BPPP Ambon;
3. PIONs (Polytechnic Integrated Online System) dari Politeknik KP Bitung;
4. OK Sobat (Olah Kegiatan Sampah Organik Buat Magot) dari BRBIH Depok
5. Ma'Klik (Magang Langsung Klik) dari LRMPHP Bantul.

Indikator Kinerja 19

Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran

(bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) Penyelesaian Tagihan (20%) Deviasi Halaman III DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi SPM, Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing masing 5%). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja IKU Nilai IKPA Lingkup BRSDM sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian IKM 19

IKU-17. Nilai IKPA Lingkup BRSDMKP (%)									
Realisasi TW II 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	89,11	87,92	89	82	92,60	112,93	5,32	89	104,04

Capaian indikator kinerja utama nilai kinerja pelaksanaan anggaran BRSDM Triwulan II sebesar 92,60 atau 112,93% dari target 82. Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas penyampaian IKPA dari biro Keuangan Nomor : 1156/SJ.2/RC.610/VII/2023, tanggal 13 Juli 2023 tentang capaian indikator kinerja IKPA dilingkungan KKP. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi kenaikan nilai capaian sebesar 5,32%. Terhadap target Renstra 2024 capaian Triwulan II sebesar 104,04%. Secara umum, kinerja masih perlu ditingkatkan terutama pada beberapa indikator seperti: pengelolaan UP, data kontrak, pengembalian/kesalahan SPM, halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan pagu minus. Keberhasilan atas pencapaian IKU ini ditunjang oleh pemahaman yang cukup baik dari satuan kerja BRSDM terhadap komponen dan indikator dari penilaian IKPA.

Indikator Kinerja 20

Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)

Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Capaian atas indikator kinerja Nilai NKA Lingkup BRSDM akan diukur pada Triwulan IV Tahun 2023.

Indikator Kinerja 21

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023
 - a) Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2023 (5%).
 - b) Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam menyusun RKAKL Tahun 2023 (7,5%)
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
- 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai Triwulan III tahun 2023 (25%).
- 4) Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%).
- 5) Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%).

Capaian atas indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Indikator Kinerja 22

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)

Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BRSDM (%) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis unit eselon 1 (10%), 2). Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%), 3). Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%), 4). Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%), 5). Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%), 6). Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan II s.d. Triwulan III Tahun 2023 (15%). Capaian atas indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa akan diukur pada Triwulan IV tahun 2023.

Indikator Kinerja 23

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)

Indikator Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KKP yang telah dilatih dan jumlah Aparatur KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal tugas belajar untuk pendidikan S2 dan S3. Capaian atas indikator kinerja utama Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian IKM 23

IKU-23. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Orang)									
Realisasi TW II 2020-2022			2023					Renstra KKP 2020-2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2022-2023	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	469	424	5.195	3.099	3.900	120	120	5.400	72,22

Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebanyak orang 3.900 (120%). Capaian ini terdistribusi atas orang peserta tugas dan ijin belajar KKP dan 99 orang dan 3,801 Orang jumlah lulusan pelatihan aparatur KKP. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 mengalami peningkatan

sebesar 819,81%. Terhadap target Renstra BRSDM Tahun 2024 capaian Triwulan II Tahun 2023 telah mencapai 72,22 %.

Dengan pengembangan metode pelatihan *blended* atau campuran antara metode pelatihan online dan offline. Disamping itu, dukungan tenaga widyaiswara yang kompeten serta sarana/prasarana pelatihan yang memadai sebagai penyebab utama keberhasilan pencapaian IKU. Peningkatan capaian pelatihan aparatur juga didukung oleh faktor para widyaiswara/instruktur di BDA Sukamandi yang telah memahami dan dapat beradaptasi dalam pemanfaatan platform MOOC (*Massive Open Online Course*) LAN-RI. Tingkat adaptasi dan pemahaman atas penggunaan platform yang baru ini juga mendukung tercapainya jumlah pelatihan aparatur KP, disamping penggunaan e-Milea yang merupakan platform utama untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan online di KKP.

Selain itu, terkait tugas dan ijin belajar, tercapainya indikator ini dikarenakan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pusat Pendidikan KP, Sekretariat BRSDM, Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP, eselon I lingkup KKP. Selain itu hal ini dapat tercapai karena pengawalan dan pendampingan baik dari Pusat Pendidikan KP, Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP, serta Eselon I lingkup KKP dalam melaksanakan dengan baik Keputusan Menteri terkait dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar maupun Izin Belajar.

3.3 Realisasi Anggaran BRSDM Tahun 2023

Penyerapan anggaran lingkup BRSDM Tahun 2023 data per tanggal 30 Juni 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Tabel Realisasi Anggaran BRSDM

SATUAN KERJA	Pagu Total	Realisasi Total	%	Sisa Total
SATKER PUSAT				
SEKRETARIAT BRSDM	98.159.565.000	38.563.489.780	39,29%	59.596.075.220
PUSAT RISET PERIKANAN	41.622.967.000	11.827.488.569	28,42%	29.795.478.431
	139.782.532.000	50.390.978.349	36,05%	89.391.553.651

SATUAN KERJA	Pagu Total	Realisasi Total	%	Sisa Total
BBRPPBKP SLIPI	18.750.000.000	7.960.090.348	42,45%	10.789.909.652
BBRSEKP ANCOL	10.550.000.000	4.872.195.273	46,18%	5.677.804.727
	29.300.000.000	12.832.285.621	43,80%	16.467.714.379
UPT PUSRISKEL	10.962.351.000	3.911.485.870	35,68%	7.050.865.130
UPT PUSRISKAN	354.221.854.000	158.080.338.196	44,63%	196.141.515.804
UPT PUSDIK	454.636.148.000	183.286.533.188	40,31%	271.349.614.812
UPT PUSLATLUH	401.376.630.000	177.166.852.925	44,14%	224.209.777.075
	1.221.196.983.000	522.445.210.179	42,78%	698.751.772.821
TOTAL BRSDM	1.390.279.515.000	585.668.474.149	42,13%	804.611.040.851

Realisasi anggaran BRSDM sebesar 42,13 % dengan tingkat konsistensi sebagaimana pada evaluasi Smart DJA 82,36 %. Ini menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada POK Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja BRSDM dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	KODE	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1 Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	2375.SCC.001	28.614.286.000	7.413.031.657	25,91
2 Nilai PNBP BRSDM (Rupiah Miliar)	2376.SAC.001	146.724.292.000	54.592.546.189	37,21
3 Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	2375.AFA.001	2.030.000.000	766.323.002	37,75
	2375.ABW.002	1.017.156.000	259.043.647	25,47
	2375.BDJ.001	4.560.018.000	1.243.057.601	27,26
	2375.DCC.001	792.900.000	32.816.000	4,14
	2376.AFA.001	1.000.000.000	502.722.507	50,27
	2376.ABW.001	1.800.000.000	602.197.246	33,46

INDIKATOR KINERJA		KODE	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	2375.QDD.001	76.950.000.000	32.941.233.538	42,81
5		Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)			
6		Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)			
7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Pintar) (desa)	2375.QDD.002	8.000.000.000	896.288.733	11,20
		2375.QJA.001	1.500.000.000	14.581.482	0,97
		2376.QDD.001	1.367.338.000	481.726.765	35,23
8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2375.RAL.001	5.320.467.000	2.804.870.933	52,72
		2375.RBQ.001	1.463.057.000	800.530.424	54,72
		2376.RAA.001	11.427.794.000	1.730.870.895	15,15
		2376.RBJ.001	40.754.904.000	4.580.912.078	11,24
9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	6703.AFA.001	4.673.250.000	0	-
		6703.RAN.001	700.000.000	0	-
10	Nilai PM PRB Lingkup BRSDMKP (nilai)	2378.EBD.974	781.540.000	394.517.584	50,48
		2378.EBA.994	989.462.966.000	452.655.629.978	45,75
		2378.EBA.962	10.197.544.000	4.558.564.739	44,70
11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDMKP (unit)	2378.EBA.957	450.000.000	73.175.730	16,26
		2378.EBA.960	970.000.000	188.243.581	19,41
12	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2022 (%)	2378.EBD.955	5.957.211.000	2.101.858.538	35,28

INDIKATOR KINERJA		KODE	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
13	Nilai Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)				
14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDMKP (%)				
15	Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)				
16	Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)				
17	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	2378.EBA.956	2.126.688.000	702.588.634	33,04
18	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	2378.EBB.951	1.400.000.000	1.019.356.547	72,81
		2378.EBB.971	1.200.000.000	507.667.500	42,31
19	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	2378.EBC.954	3.382.686.000	1.642.966.361	48,57
20	Nilai PM SAKIP BRSDM (nilai)	2378.EBD.952	7.697.074.000	3.634.804.315	47,22
		2378.EBD.953	7.086.305.000	1.929.104.123	27,22
21	Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	2378.EBA.963	1.502.950.000	549.381.437	36,55
		2378.FAB.001	501.000.000	223.000.000	44,51
22	Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (nilai)	2378.EBA.958	6.447.002.000	1.899.524.782	29,46
		2378.CAN.001	300.000.000	0	0,00

INDIKATOR KINERJA		KODE	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
23	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	4345.EBC.996	12.121.087.000	3.925.337.603	32,38
Total Anggaran BRSDM			1.390.279.515.000	585.668.474.149	42,13

Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BRSDM

Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (*output*) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara

pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

Tabel 17. Perhitungan Efisiensi Anggaran BRSDM 2023.

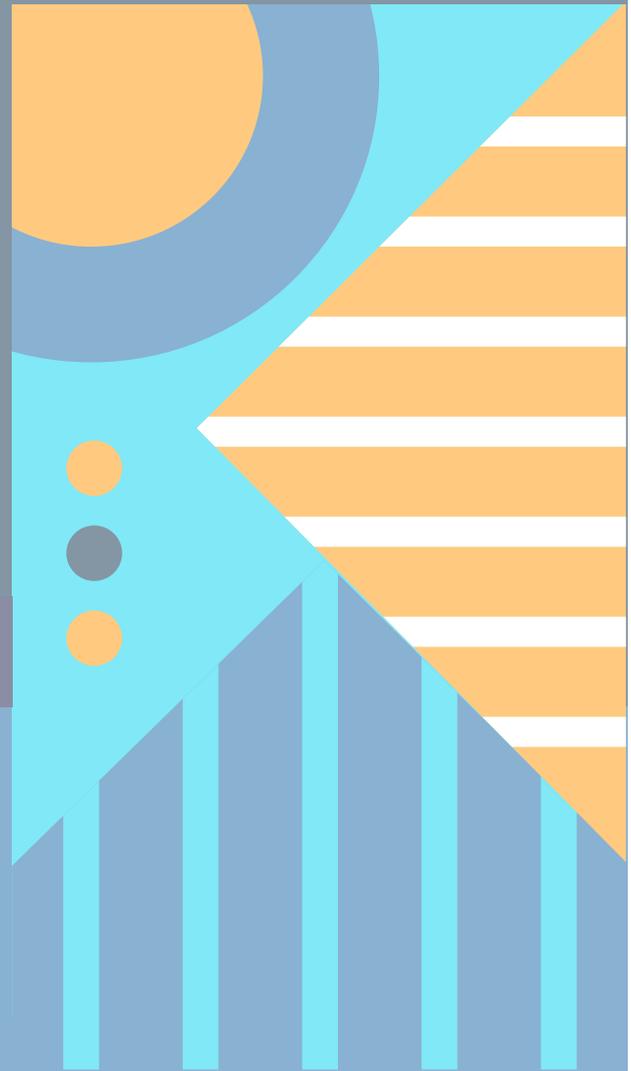
Capaian Sasaran Program	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi
2,6	45,8	91,68	21,33	-20	0

Sumber : Aplikasi DJA SMART, Kemenkeu tanggal 14 Juli 2023

Efisiensi anggaran BRSDM memperoleh skor -20. Pencapaian efisiensi sebesar -20 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran pada Triwulan II 2023 belum menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan pada level minus. Nilai efisiensi dihitung berdasarkan rentang efisiensi dari -20 sampai +20. Kondisi ini terjadi karena pengukuran *output* kegiatan dilakukan pada akhir tahun. sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran pada Triwulan berikutnya, sehingga diperoleh nilai efisiensi positif (+20).



Halaman Kosong



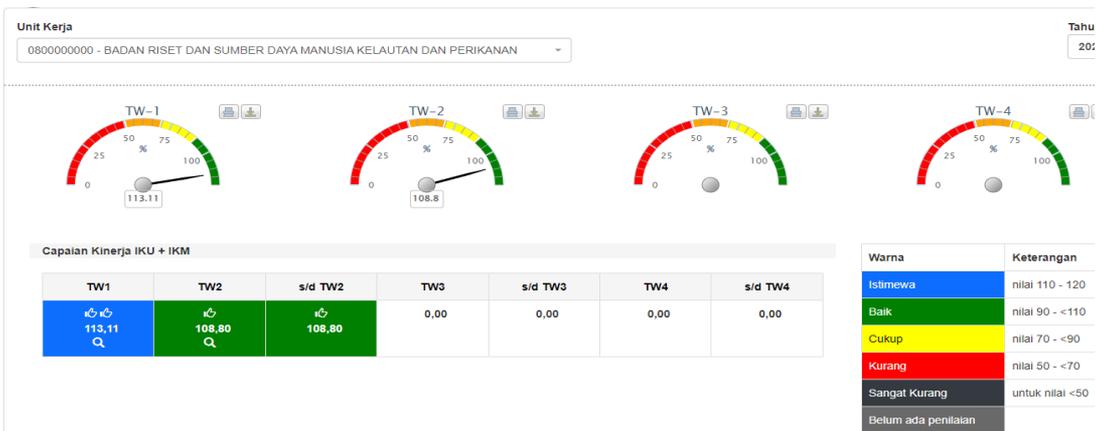
Bab IV

Penutup

- 4.1. Capaian Kinerja Utama
- 4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2023, BRSDM memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 8 Sasaran Program dan 23 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BRSDM tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRSDM pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 108,80%, sebagaimana dashboard kinerja sebagai berikut:



Gambar 5. Capaian Kinerja BRSDM Triwulan II Tahun 2023

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dari 23 Indikator Kinerja yang menjadi target BRSDM, terdapat 4 Indikator Kinerja berstatus biru dan 4 Indikator Kinerja capaian hijau atau telah mencapai/melampaui dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BRSDM Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok) dengan target Triwulan II sebanyak 950 Kelompok dan capaian sebesar 2.033 Kelompok (120%);
2. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya dengan target Triwulan II sebanyak 180 Kelompok dan capaian sebesar 180 Kelompok (100%);
3. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit) dengan target Triwulan II sebanyak 13 unit dan capaian 13 unit (100%);

-
4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM dengan target Triwulan II sebanyak 71% dan capaian sebesar 72,75% (102,46);
 5. Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dengan target Triwulan II sebanyak 92% dan capaian sebesar 99,76% (108,43);
 6. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%) dengan target Triwulan II sebanyak 75% dan capaian sebesar 91,92% (120%);
 7. Nilai IKPA Lingkup BRSDM dengan target Triwulan II sebanyak 82% dan capaian sebesar 92,60% (112,93%);
 8. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang) dengan target Triwulan II sebanyak 3.099 orang dan capaian sebesar 3.900 orang (120%).

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BRSDM cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. IKU dengan Capaian Triwulan Melampaui Target Tahunan

Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu Persentase unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dan Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM. Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

2. IKU dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan

bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRSDM. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRSDM. Akhirnya, BRSDM berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

Lampiran

Lampiran 1. PK BRSDM 2023 Januari



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Nilai PNBP BRSDM (Rupiah Miliar)	24,731
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	392
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk	4	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	3.000
		5	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.800
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)	12.342
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	7
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	14
6	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan	9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	11
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	10	Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)	33,5
		11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit)	15

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		12 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2023 (%)	≤0,5
		13 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	75
		14 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRSDM (nilai)	80,5
		15 Nilai Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)	3,1
		16 Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		17 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%)	75
		18 Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (%)	75
		19 Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	89
		20 Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	86
		21 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	77,5
		22 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	77,5
		23 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5005

Data Anggaran		
NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	327.300.950
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	198.834.940
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	128.466.010
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	5.373.250
	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	2.800.000
	Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	2.323.250
	Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan	250.000
3	Program Dukungan Manajemen	1.050.962.966
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRSDMKP	1.039.462.966
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	11.500.000
Total Anggaran Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		1.383.637.166

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Nyoman Radiarta



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Juni 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	70
		2	Nilai PNBP BRSDM (Rupiah Miliar)	24,731
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	392
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	3.000
		5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.800
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRSDM (orang)	12.342
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	7
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	39
6	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan	9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	11
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	10	Nilai PM PRB Lingkup BRSDM (nilai)	33,5
		11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BRSDM (unit)	15

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		12 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA 2022 (%)	≤0,5
		13 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BRSDM (indeks)	75
		14 Nilai PM SAKIP BRSDM (nilai)	80,5
		15 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BRSDM (nilai)	3,1
		16 Persentase Unit kerja Lingkup BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		17 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM (%)	75
		18 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BRSDM (Nilai)	75
		19 Nilai IKPA Lingkup BRSDM (nilai)	89
		20 Nilai NKA Lingkup BRSDM (nilai)	86
		21 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BRSDM (%)	77,5
		22 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BRSDM (%)	77,5
		23 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.195

Data Anggaran		
NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	333.322.212
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	203.074.328
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	130.247.884
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	5.373.250
	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan	2.800.000
	Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan	2.323.250
	Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan	250.000
3	Program Dukungan Manajemen	1.051.584.053
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRSDMKP	1.039.462.966
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	12.121.087
Total Anggaran Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		1.390.279.515

Jakarta, 15 Juni 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

Lampiran 3. SK Tim Penyusun LKJ



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2022 DAN TRIWULANAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan Triwulanan Tahun 2023 agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk tim penyusun laporan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan Triwulanan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022 DAN TRIWULANAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan Triwulanan Tahun 2023 selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun LKj BRSDM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun LKj BRSDM sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- A. Pengarah
 - Memberikan arahan kebijakan, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas pelaksanaan kegiatan.
 - B. Penanggung Jawab
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan dukungan manajemen.
 - C. Koordinator
 - Bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja.
 - D. Ketua
 - Bertanggung jawab terhadap penyelesaian pelaksanaan kegiatan termasuk penyiapan bahan, pengumpulan capaian kinerja dan bukti dukung serta penyusunan laporan kinerja.
 - E. Anggota
 1. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 2. Mengumpulkan capaian kinerja dan bukti dukung atas capaian kinerja BRSDM; dan
 3. Menyusun buku laporan kinerja BRSDM Tahun 2022 dan Triwulanan Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Penyusun LKj BRSDM bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2023
KEPALA BADAN RISET
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Sekretaris Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia KP



Kusdiantoro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022
DAN TRIWULANAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BRSDM
TAHUN 2022 DAN TRIWULANAN TAHUN 2023

A. PENGARAH

Kepala BRSDM

B. PENANGGUNG JAWAB

1. Sekretaris BRSDM
2. Kepala Pusat Riset Perikanan;
3. Kepala Pusat Riset Kelautan;
4. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
5. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
6. Kepala Balai Besar Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; dan
7. Kepala Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

C. KOORDINATOR

Tri Yuwono, S.Pi., M.Si (Perencana Muda, Sekretariat BRSDM)

D. KETUA

Rahmadi Sunoko, S.Pi., M.Sc. (Analisis Kebijakan Muda, Sekretariat BRSDM)

E. ANGGOTA

No.	Nama	Jabatan
1.	Dewi Rukmasari, S.Pi.	Perencana Muda, Sekretariat BRSDM
2.	Eka Sunahwati, S.Pi., M.Si.	Analisis Perencanaan, Sekretariat BRSDM
3.	Ir. Andi Soesmono, M.EM.	Analisis Kebijakan Muda, Sekretariat BRSDM
4.	Siti Amania Raydesyana, S.Kom.	Pranata Humas Muda, Sekretariat BRSDM
5.	Asep Sutiana, S.St.Pi., M.Si.	Statistisi Muda, Sekretariat BRSDM
6.	Liana Sari, S.T., M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya, Sekretariat BRSDM

No.	Nama	Jabatan
7.	Putut Erie Sudjito, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda, Sekretariat BRSDM
8.	Wawan Nurliansyah, S.St.Pi., M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda, Sekretariat BRSDM
9.	Hari Purwanto, S.Pi., M.AP.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda
10.	Sutopo, S.Pi.	Analisis Kepegawaian Muda
11.	Drs Mas Adi Pranggono, MM	Perencana Madya, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP
12.	Supriyadi, S.Pi	Perencana Muda, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP
13.	Norma Maria Pricielya Manoppo, S.Pi, M.Si.	Perencana Madya, Pusat Pendidikan KP
14.	Suryat Dedie Susena, S.Pi., M.A.	Perencana Muda, Pusat Pendidikan KP
15.	Erish Widjanarko, S.T.	Perencana Madya, Pusat Riset Kelautan
16.	Joko Hardono, S.Si., M.E.	Perencana Muda, Pusat Riset Kelautan
17.	Dra Endang Sriyati	Perencana Madya, Pusat Riset Perikanan
18.	Sugesti Titik Maryati, S.E.	Perencana Muda, Pusat Riset Perikanan
19.	Fenni Eddrisea, SP., M.Si.	Perencana Muda, BBRSEKP
20.	Zilfia Nora, S.Pi., M.SI.	Perencana Muda, BBRPPBKP
21.	Ridona Viju Rafeliandi, A.Md., S.Kom.	Pranata Komputer Utama, Sekretariat BRSDM
22.	Desianti Yuanita, S.I.Kom.	Analisis Monev, Pusat Pendidikan KP
23.	Ary Budhy Purwoko, S.AP.	Analisis Monev, Pusat Penyuluhan dan Pelatihan KP
24.	Muthia Khelfa Pramesti, S.Si.	Pengelola Program dan Anggaran BBRPPBKP
25.	Nurma Yunita D., S.E.	Pelaksana Seksi Monev BBRSEKP
26.	Sari Novita, S.T.	Pengadministrasi Seksi Monev, Pusat Riset Kelautan
27.	Ir.Yuli Setiawati.M.M	Analisis Monev, Sekretariat BRSDM

No.	Nama	Jabatan
28.	Rahayu Boru Sirait,A.Md	Pelaksana Subkoordinator Pelaporan,Sekretariat BRSDM
29.	Ferliana Widyasari	Analisis Monev, Sekretariat BRSDM

KEPALA BADAN RISET
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Sekretaris Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia KP



Kusdiantoro

